

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerataan dan keadilan sosial pada umumnya merupakan salah satu dari tujuan utama rezim Orde Baru, sebagaimana dikemukakan dalam Trilogi Pembangunan. Bagi para akademisi, ahli statistik di BPS dan pemerintahan “kemiskinan” didefinisikan dan dianalisis sebagai orang yang berada dibawah garis kemiskinan yang definisinya bervariasi, sedangkan “distribusi” diukur dengan menggunakan indeks kesenjangan.¹

Kemiskinan merupakan permasalahan kemanusiaan sepanjang sejarah kehidupan di muka bumi secara universal, bahkan di negara maju sekalipun tetap ada permasalahan tersebut. Di Indonesia Kemiskinan menjadi musuh utama yang senantiasa dicarikan solusi untuk dipecahkan. Menurut perhitungan Badan Pusat Statistik yang dilakukan pada September 2015 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin secara tahunan menjadi 28,51 juta orang pada September 2015 atau bertambah 780 ribu orang dibanding September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang.² Kenaikan jumlah penduduk miskin paling signifikan tercatat pada periode September 2014 ke Maret 2015, di antaranya dipicu oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak pada November 2014, dan juga imbas dari perlambatan ekonomi yang menekan indikator kesejahteraan di sektor riil.

Sedangkan dari data terakhir Badan Pusat Statistik kabupaten Pati pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin kabupaten Pati sebesar 148 ribu jiwa (12,06%).³

¹ Tri Wibowo Budi Santoso & Hadi Susilo, *Ekonomi Indonesia (Edisi Kedua)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 252.

² Aditya Himawan, (2016), *BPS Akui Angka Kemiskinan di Indonesia Meningkat*. (online). Tersedia: <http://www.suara.com/bisnis/2016/01/04/211058/bps-akui-angka-kemiskinan-di-indonesia-meningkat> (1 April 2016)

³ Angka kemiskinan kabupaten Pati, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati.

Tabel 1.1
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Pati 2014

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)	Presentase (%)
2012	162.000	13,61
2013	157.900	12,94
2014	148.000	12,06

(Sumber: diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati)

Dari data di atas menandakan bahwa angka kemiskinan di kabupaten Pati masih dalam kategori tinggi. Masih besarnya jumlah penduduk miskin ini juga disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah sehingga tidak bisa atau tidak mampu menyerap angkatan kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja (*jobless growth*). Alhasil, tingkat pengangguran masih banyak yang membuat angka kemiskinan juga membengkak.

Penduduk miskin yang berada di sekitar garis kemiskinan akan bertambah sejalan dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok, Penduduk miskin seperti ini bisa saja ditolong dengan bantuan yang berasal dari kompensasi dana subsidi BBM, karena pada dasarnya mereka memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dan memperbaiki kondisi ekonominya. Namun untuk penduduk miskin yang sangat "parah" (*chronic poor*), dana bantuan berupa subsidi ataupun transfer langsung tidak akan dapat membawa mereka keluar dari kemiskinan. Karena, tidak menyelesaikan masalah sebenarnya, yaitu tidak adanya akses penduduk miskin terhadap faktor-faktor ekonomi sehingga sulit untuk merubah kondisi hidup mereka. Untuk itu pemerintah perlu secepatnya membuka akses faktor produksi bagi penduduk miskin.⁴

Pengentasan kemiskinan dengan cara memberdayakan UMKM memiliki potensi yang cukup baik. Sektor UMKM memiliki kontribusi yang

⁴ dony Abdul Chalid. (2005). Pengentasan Kemiskinan Lewat UMKM. (Online). Tersedia: <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F29863/Pengentasan%20Kemiskinan%20Lewat%20UMKM-SK.htm> (5 April 2016)

besar bagi penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 95% tenaga kerja. Upaya untuk memajukan sektor UMKM tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya. Pengembangan UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti merupakan penggerak utama sektor riil yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM pada tahun 2011 sebanyak 55,2 juta unit dengan terbagi sebagai berikut 54.559.969 unit Usaha Mikro, 602.195 unit Usaha kecil dan 44.280 unit Usaha Menengah. Jumlah UMKM pada tahun 2011 adalah sekitar 99,99 persen dari jumlah total unit usaha yang ada.⁵ Sedangkan di Kabupaten Pati, Berdasarkan data dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Pati, jumlah UMKM pada tahun 2015 sebanyak 23.000 unit dengan didominasi oleh usaha mikro sebanyak 70% dan ini perlu di berdayakan agar dapat berkembang sehingga menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.⁶

Ditinjau dari penyerapan tenaga kerja pada tahun 2011, UMKM mampu menyerap sebanyak 101.722.458 orang tenaga kerja, apabila dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 2,33% menjadi 99.401.775 orang. Bahwa dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang relatif besar, sektor ini telah menjamin stabilitas pasar tenaga kerja, penekanan pengangguran dan menjadi wahana bangkitnya wirausaha baru, serta tumbuhnya wirausaha nasional yang tangguh dan mandiri.⁷

Namun demikian perkembangan UMKM umumnya masih mengalami berbagai masalah dan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, Masalah yang hingga kini masih menjadi kendala dalam pengembangan

⁵Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, *Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan Umkm*, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Hlm. 1

⁶Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kabupaten Pati.

⁷ Rencana Strategis, Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2012 – 2014, hlm. 3.

usaha UMKM adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya UMKM mengakses sumber permodalan.

Pengusaha muslim Indonesia membutuhkan pembukaan lapangan kerja untuk menyerap pengangguran yang mayoritasnya adalah umat Islam. Umat Islam membutuhkan Industri pendirian Industri-industri dan pabrik-pabrik baru yang memungkinkan adanya peningkatan produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan. Usaha sektor UMKM dimaksud, harus menjadi perhatian dan *concern* umat Islam secara bersama. Dalam hal ini, sudah saatnya kalangan perbankan syariah memberikan perhatian lebih pada pola pembiayaan melalui skema *Mudharabah* dan *Musyarakah*.⁸

Oleh karena itu, Islam memberikan sebuah konsep yang dapat memberikan kesempatan bagi orang-orang yang ingin mengembangkan usahanya, sehingga kemiskinan pun sedikit demi sedikit tidak lagi menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Salah satu konsep dalam Islam yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam pemberdayaan UMKM sehingga dapat menyerap tenaga kerja ialah *Mudhârabah*. *Mudhârabah* merupakan konsep dalam bertransaksi yang dapat menghubungkan mereka yang mempunyai kelebihan modal dengan mereka yang tidak mempunyai modal, namun memiliki keahlian dalam menjalankan bisnis, sehingga akan membangun sebuah kerjasama yang harmonis diantara mereka berdua.

Konsep *Mudharabah* sekarang ini sudah banyak dipakai oleh lembaga keuangan syariah seperti: Perbankan Syariah dan Koperasi Syariah. Ketika bank syariah pertama kali berkembang, baik di tanah air maupun di mancanegara, Seringkali dikatakan bahwa bank syariah adalah bank bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan bank syariah dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem Bunga.⁹

Bank Syariah lebih dikenal dengan sistem bagi hasil yang mempunyai berbagai produk yang memakai akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*,

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 78.

⁹ Adiwarmanto Karim, *BANK ISLAM: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Kedua*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 191.

dianggap lebih adil bagi semua pihak. Namun saat ini sepertinya sudah mulai terjadi pergeseran di Bank Syariah, Bank Syariah lebih senang dan lebih mengunggulkan produk pembiayaan dengan akad Murabahah, yang memberikan hasil yang lebih pasti. Bisa dilihat perbandingan pembiayaan di Bank Syariah dengan menggunakan akad *Mudharabah* dan *murabahah*.

Tabel 1.2

Produk Pembiayaan di Bank Syariah (dalam Milyar Rupiah)

NO	AKAD	Januari 2016	Februari 2016	Maret 2016
1	<i>Mudharabah</i>	14,469	14,268	14,273
2	<i>Musyarakah</i>	59,638	60,845	62,737
3	<i>Murabahah</i>	122,287	122,042	122,162

(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah Maret 2016)

Jika melihat data di atas terlihat sangat jauh perbandingan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah antara yang menggunakan akad *Mudharabah* dengan produk yang menggunakan akad murabahah. Keputusan bank syariah lebih memilih produk murabahah karena akad ini lebih memberi kepastian terhadap tingkat pengembalian. Bank syariah juga belum begitu berani menanggung resiko, jika menggunakan akad *Mudharabah*.

Masih kecilnya pembiayaan dengan akad *Mudharabah* dibanding dengan akad *Murabahah* tidak hanya terjadi pada perbankan syariah saja tetapi juga terjadi pada koperasi syariah yang sering dikenal sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Pembiayaan *Mudharabah* yang ada pada koperasi syariah merupakan produk unggulan yang seharusnya dikembangkan oleh koperasi syariah yang ada sekarang ini. Termasuk Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Minna Mandiri yang merupakan salah satu koperasi syariah yang berpusat di Kabupaten Pati tepatnya di kecamatan Juwana.

KSPS Minna Mandiri termasuk salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang sedang berkembang dilingkungan masyarakat. KSPS ini dikenal dari golongan menengah kebawah sampai golongan menengah keatas. Layanan KSPS Minna Mandiri diminati sebagian besar kalangan menengah kebawah yang membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya dimana KSPS Minna

Mandiri berperan sebagai mitra usaha dengan sistem bagi hasil atau margin yang sesuai dengan syariah dan peraturan yang sudah ditetapkan.

Tabel 1.3

Produk Pembiayaan di KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana (dalam Rupiah)

NO	AKAD	31 Desember 2015
1	<i>Bai Bitsaman Ajil</i>	2.654.439.500
2	<i>Murabahah</i>	6.050.187.500
3	<i>Mudharabah</i>	285.539.000

(Sumber: diolah dari Laporan Keuangan KSPS Minna Mandiri Desember 2015)

Pembiayaan *Mudharabah* sangat relevan dalam upaya untuk meningkatkan produktifitas sektor rill dengan memberikan pembiayaan *Mudharabah* yang dapat meningkatkan potensi dunia usaha terutama UMKM dalam meningkatkan jumlah dan kualitas produksinya. Namun pada kenyataannya pembiayaan *Mudharabah* seakan produk yang sangat ditakuti oleh koperasi syariah yang membuat mereka lebih memilih *Murabahah* sebagai produk yang paling banyak menghasilkan bagi koperasi syariah. Ada beberapa manfaat yang muncul jika presentase pembiayaan melalui pola *Mudharabah* meningkat, di antaranya: akan menggairahkan sektor rill, Investasi akan meningkat, yang disertai dengan pembukaan lapangan kerja baru, akibatnya tingkat pengangguran akan dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan bertambah.

Oleh sebab itu, dari latar belakang di atas peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: "Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dalam Pemberdayaan UMKM (Studi Pada KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana)".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut di atas maka batasan dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan produk penyaluran dana dengan menggunakan akad *Mudharabah* yang ada di KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana. Sehingga dari pembiayaan tersebut dapat memberdayakan UMKM dan mengatasi masalah kemiskinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dalam pemberdayaan UMKM di KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana.?
2. Apa faktor-faktor penghambat Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dalam pemberdayaan UMKM di KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana.?
3. Bagaimana solusi penghambat Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dalam pemberdayaan UMKM di KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana.?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dalam pemberdayaan UMKM di KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana..
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dalam pemberdayaan UMKM di KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana.
3. Untuk menganalisis solusi penghambat Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dalam pemberdayaan UMKM di KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana.

E. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang selama ini didapat dari bangku kuliah secara teoritis dikaitkan dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan. Selain itu juga dapat menambah pengalaman, wawasan, dan pengetahuan dalam ilmu ekonomi syariah khususnya pada lembaga keuangan syariah.

2. Koperasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan pertimbangan koperasi syariah Indonesia dalam mengambil setiap keputusan saat menerapkan pembiayaan dengan akad *Mudharabah*.

3. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang Lembaga Keuangan Syariah dan UMKM, khususnya bagaimana penerapan Pembiayaan dengan akad *Mudharabah* dalam pemberdayaan UMKM. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian lebih lanjut.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka menguraikan perumusan di atas, maka penulis berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami, maka dibuat sistematika kerangka skripsi sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian ini memuat halaman judul, abstraksi, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, halaman pengantar dan halaman isi.

2. Bagian isi

Bagian isi terdiri atas 5 (lima) bab dan setiap babnya terdiri dari sub bab yaitu sebagai berikut :

- BAB I : Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.
- BAB II : Bab ini berisi landasan teori dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan juga mengungkapkan kerangka pemikiran.
- BAB III : Bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian sumber data, lokasi penelitian teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.
- BAB IV : Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data penelitian, pembahasan dan analisis penelitian.
- BAB V : Berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup
3. Bagian Akhir
- Bagian akhir ini memuat daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis dan lampiran-lampiran.